



Strategi Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Situ Gunung melalui Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2024

Fienaurisilmi¹⁾, Dede Sri Kartini²⁾, Antik Bintari³⁾

Universitas Padjajaran, Sumedang, Indonesia

fienaurisilmi21001@mail.unpad.ac.id¹⁾

dede.sri.kartini@unpad.ac.id²⁾

a.bintari@unpad.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berbasis konservasi di kawasan Situ Gunung melalui pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Fokus kajian diarahkan pada empat dimensi strategi menurut teori Kooten, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi dukungan sumber daya, dan strategi kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan terbatas, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah mengarah pada pelestarian lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Kurangnya koordinasi lintas aktor, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi konservasi dan pariwisata harus dilaksanakan secara terpadu dan responsif terhadap perubahan perilaku wisatawan agar kawasan tetap kompetitif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya peningkatan co-management antara pengelola dan masyarakat lokal, serta digitalisasi dalam promosi dan pelayanan wisata untuk menjawab tuntutan zaman.

Kata kunci: Konservasi, Partisipasi Masyarakat, Strategi Kelembagaan, Taman Nasional, Wisata Berkelanjutan

Abstract

This study aims to analyze the government's strategy in developing conservation-based tourism in Situ Gunung area through the management of Gunung Gede Pangrango National Park. The focus of the study is directed at four dimensions of strategy according to Kooten's theory, namely organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. The approach used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, limited field observations, and document review. The results show that the strategies implemented have led to environmental conservation and local community involvement, but there are still gaps between planning and implementation. Lack of coordination across actors, limited utilization of digital technology, and lack of technical training are the main obstacles. This research concludes that conservation and tourism strategies must be implemented in an integrated manner and be responsive to changes in tourist behavior to keep the area competitive and sustainable. The research also recommends the need for increased co-management between managers and local communities, as well as digitalization in tourism promotion and services to respond to the demands of the times.

Keyword: Conservation, Community Participation, Institutional Strategy, National Park, Sustainable Tourism

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam sektor pariwisata (Husna, 2022). Di tengah upaya pembangunan berkelanjutan, pengembangan pariwisata berbasis konservasi menjadi pendekatan strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Salah satu kawasan yang mencerminkan pendekatan ini adalah Situ Gunung, yang berada dalam wilayah kerja Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Jawa Barat. Kawasan ini menawarkan berbagai atraksi alam seperti jembatan gantung terpanjang di Indonesia, Curug Sawer, dan Teras Bintang yang dikelola dalam kerangka konservasi berbasis zonasi taman nasional.

Sejumlah studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Penelitian oleh Jawia Reubun et al. (2024) mengenai strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata Pulau Bair menunjukkan bahwa implementasi strategi masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, Simangungsong & Ziliwu (2021) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Pantai Malaga yang masih minim pelibatan. Namun, kebanyakan penelitian tersebut berfokus pada strategi pemerintah daerah dan belum banyak yang mengkaji secara mendalam strategi pemerintah pusat melalui lembaga konservasi seperti taman nasional, khususnya dalam konteks integrasi antara konservasi dan pengembangan pariwisata.

Kajian-kajian internasional turut menggarisbawahi peran strategis taman nasional dalam mengelola destinasi wisata berbasis alam. Eagles et al. (2002) menekankan bahwa taman nasional modern harus mampu menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi secara simultan. Hal ini menjadi penting terutama bagi negara berkembang yang memiliki tekanan tinggi terhadap kawasan lindung akibat aktivitas ekonomi.

Kendati demikian, hingga saat ini belum banyak studi yang secara spesifik menganalisis bagaimana strategi pemerintah pusat melalui lembaga teknis seperti TNGGP diterapkan untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis konservasi di Indonesia. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi fokus artikel ini. Penelitian ini tidak hanya meninjau efektivitas strategi pembangunan pariwisata dari aspek kelembagaan, tetapi juga menilai sejauh mana strategi tersebut selaras dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Penelitian ini mengadopsi teori strategi Kooten dalam Mudiono et al. (2023) yang membagi strategi menjadi empat dimensi, yaitu *corporate strategy*, *program strategy*, *resource support strategy*, dan *institutional strategy*. Teori ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata Situ Gunung melalui TNGGP. Dengan pendekatan ini, artikel ini menawarkan kontribusi baru dalam memperluas pemahaman tentang strategi pembangunan pariwisata berbasis konservasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui unit pelaksana teknis di kawasan taman nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pemerintah melalui TNGGP dalam mengembangkan pariwisata di kawasan Situ Gunung, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan taman nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif menurut S et al. (2024), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kawasan Situ Gunung melalui TNGGP. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi proses, makna, dan dinamika sosial di balik kebijakan pengelolaan pariwisata berbasis konservasi yang dijalankan oleh pemerintah melalui lembaga teknis. Desain penelitian ini bersifat eksploratif, dengan fokus utama pada bagaimana strategi-strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh TNGGP berpengaruh terhadap

pengembangan kawasan wisata serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder menurut Pratama & Apriani (2023). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan kawasan Situ Gunung. Informan utama meliputi perwakilan dari pihak pengelola TNGGP sebagai pelaksana kebijakan konservasi dan wisata alam, mitra swasta (PT. Fontis Aquam Vivam) sebagai pengelola fasilitas wisata, perwakilan masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata, serta wisatawan sebagai pengguna layanan. Penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip representativitas informasi dan keterkaitan langsung terhadap objek kajian, sehingga dapat mencerminkan berbagai perspektif dari pemangku kepentingan yang berbeda. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Permen LHK No. P.76/MENLHK-SETJEN/2015), laporan kebijakan TNGGP, dokumen pengelolaan kawasan wisata, laporan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), publikasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, serta artikel dan berita terkini yang relevan dengan isu pengelolaan Situ Gunung. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk melengkapi dan mengonfirmasi temuan lapangan serta memberikan konteks normatif dan empiris terhadap strategi yang dianalisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi, yakni mengombinasikan wawancara, observasi lapangan terbatas, dan telaah dokumen (Citriadin, 2020). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang dikembangkan berdasarkan teori strategi Kooten. Observasi terbatas dilakukan untuk memahami kondisi fisik kawasan, fasilitas pendukung, serta pola interaksi antar aktor wisata di lapangan. Sementara itu, dokumen dan arsip yang dikaji digunakan untuk memverifikasi keabsahan informasi dari wawancara dan memberikan gambaran longitudinal tentang pengelolaan kawasan.

Untuk memastikan keandalan dan validitas temuan, teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan induktif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikoding dan dikelompokkan berdasarkan empat dimensi strategi Kooten: *corporate strategy*, *program strategy*, *resource support strategy*, dan *institutional strategy*. Setiap dimensi dianalisis dengan mengaitkan teori dengan temuan lapangan, guna mengidentifikasi pola, kesenjangan implementasi, serta efektivitas strategi yang diterapkan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta pemeriksaan silang antar data primer dan sekunder. Hasil analisis disusun secara naratif untuk menunjukkan bagaimana strategi pemerintah melalui TNGGP dalam pengembangan pariwisata Situ Gunung berjalan secara faktual, serta bagaimana strategi tersebut dapat ditingkatkan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan strategi yang diterapkan oleh pemerintah melalui TNGGP dalam pengembangan pariwisata di kawasan Situ Gunung tahun 2024 berdasarkan empat dimensi strategi menurut Kooten, yaitu: *corporate strategy*, *program strategy*, *resource support strategy*, dan *institutional strategy*. Setiap dimensi memberikan gambaran berbeda terkait peran, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata berbasis konservasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum strategi organisasi atau *corporate strategy* telah difokuskan pada penguatan visi konservasi di kawasan Situ Gunung. Hal ini tercermin dari upaya pelestarian lingkungan melalui zonasi kawasan, pembatasan aktivitas wisata di zona inti, serta pemisahan ruang usaha dan ruang publik. Strategi ini juga didukung oleh penetapan tarif konservasi berdasarkan kelas kawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi ini belum sepenuhnya optimal karena masih terjadi berbagai praktik yang merusak citra konservasi, seperti parkir liar, pungutan tidak resmi, dan kesemrawutan aktivitas di pintu masuk (Administrator Website Pemerintah Cimahi Kota, 2019).

Strategi program yang diterapkan oleh TNGGP terlihat melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan lokal. Terdapat upaya untuk memperluas peran masyarakat dalam pengelolaan wisata melalui pelatihan pemandu lokal, promosi budaya lokal, dan keterlibatan dalam penyediaan layanan wisata seperti glamping, *homestay*, dan kerajinan tangan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam penyebaran informasi dan promosi digital. Akun media sosial resmi destinasi belum dikelola secara maksimal, sehingga jangkauan promosi masih terbatas pada wisatawan domestik, khususnya dari wilayah Jabodetabek.

Pada dimensi *resource support strategy*, hasil menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia dan alam di kawasan Situ Gunung masih belum terstruktur dengan baik. Masyarakat lokal memang mulai terlibat dalam aktivitas wisata, namun masih minim pelatihan teknis dan edukasi konservasi yang sistematis. Banyak pelaku usaha wisata lokal belum memahami prinsip ekowisata dan keberlanjutan. Selain itu, keterlibatan sektor swasta masih terbatas, meskipun PT Fontis Aquam Vivam telah menjadi mitra utama dalam pengelolaan operasional wisata. Kebutuhan terhadap investasi infrastruktur wisata, seperti jalur trekking ramah lingkungan, pusat informasi wisata, serta layanan sanitasi yang memadai, masih menjadi persoalan mendesak.

Institutional strategy sebagai strategi kelembagaan juga mengalami tantangan besar dalam koordinasi lintas pihak. Meski terdapat kemitraan formal antara TNGGP, pihak swasta, dan masyarakat, forum koordinasi yang berkelanjutan dan sistematis belum terbentuk. Banyak kerjasama masih bersifat proyek jangka pendek dan belum terintegrasi dalam rencana jangka panjang pengelolaan kawasan. Ketidakjelasan peran antar aktor menyebabkan fragmentasi dalam pelaksanaan program, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara insidental dan bukan sebagai mitra strategis.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Situ Gunung melalui TNGGP sudah berada pada jalur konservasi, namun pelaksanaannya masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya merespons kompleksitas kebutuhan lapangan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari TNGGP, terjadi peningkatan jumlah kunjungan dari 92.302 orang pada tahun 2021 menjadi 154.537 orang pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, angka ini justru menurun masing-masing menjadi 124.938 dan 111.543 pengunjung. Penurunan berturut-turut ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan belum mampu menjaga daya tarik dan daya saing kawasan secara berkelanjutan.

Penurunan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk stagnasi inovasi atraksi, penurunan kualitas pelayanan, serta kurangnya digitalisasi sistem reservasi dan promosi. Temuan ini sejalan dengan literatur internasional yang menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam menunjang ekowisata. Sebagai contoh, menurut Gössling & Hall (2005), destinasi wisata alam yang tidak beradaptasi terhadap perubahan perilaku wisatawan, terutama dalam aspek digital dan pelayanan berbasis data, akan mengalami penurunan daya saing meskipun memiliki potensi atraksi yang tinggi.

Di sisi lain, strategi konservasi yang diterapkan secara ketat oleh TNGGP berhasil menjaga integritas ekologis kawasan. Zonasi dan pembatasan kuota kunjungan terbukti efektif dalam menjaga lingkungan, namun kebijakan ini tidak diimbangi dengan edukasi pengunjung dan masyarakat mengenai pentingnya konservasi. Akibatnya, sebagian besar pengunjung menganggap kawasan ini hanya sebagai tempat rekreasi biasa tanpa memahami nilai edukatif dan konservatif yang ingin dikedepankan. Hal ini menjadi kritik penting terhadap kurangnya strategi komunikasi publik yang menyeluruh dan inklusif.

Dalam konteks teori strategi Kooten, keempat dimensi strategi yang digunakan sebagai kerangka analisis menunjukkan adanya ketimpangan antara perencanaan strategis dan implementasi operasional. Strategi organisasi dan kelembagaan terlihat kuat dalam dokumen perencanaan dan peraturan, tetapi tidak ditunjang oleh strategi program dan pendukung sumber daya yang memadai. Artinya, terdapat gap antara kebijakan makro dan tindakan mikro yang



dilakukan di lapangan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya integrasi lintas dimensi strategi agar strategi konservasi tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam aksi kolaboratif yang berkelanjutan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, artikel ini memberikan kontribusi baru dalam menggambarkan bagaimana unit pelaksana teknis pusat (UPT) seperti TNGGP menjalankan strategi pengembangan pariwisata berbasis konservasi di lapangan. Studi sebelumnya cenderung membahas peran pemerintah daerah atau komunitas lokal dalam konteks yang lebih sempit. Artikel ini memperluas wacana dengan menunjukkan bahwa strategi pemerintah pusat di kawasan konservasi memerlukan pendekatan multidimensional dan kolaboratif yang lebih kuat, termasuk dengan memperkuat struktur komunikasi antara pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga mengusulkan bahwa strategi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku wisatawan perlu segera dirancang. Inisiatif seperti digitalisasi reservasi tiket, penyediaan informasi dalam berbagai bahasa, dan peningkatan literasi ekowisata bagi masyarakat dan pengunjung akan meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan memperkuat daya saing kawasan Situ Gunung. Selain itu, pendekatan kolaboratif yang berbasis komunitas, seperti pengelolaan bersama (co-management) antara TNGGP dan masyarakat lokal, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap kawasan konservasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata Situ Gunung sebagai kawasan wisata berbasis konservasi sangat bergantung pada efektivitas integrasi keempat dimensi strategi. Setiap dimensi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bekerja secara sinergis untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pemerintah melalui TNGGP diharapkan tidak hanya mampu menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan daya saing destinasi wisata nasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah melalui TNGGP dalam pengembangan pariwisata kawasan Situ Gunung telah diarahkan untuk mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Strategi ini mencakup pendekatan kelembagaan, program, dukungan sumber daya, dan kebijakan umum yang mencerminkan upaya mewujudkan pariwisata berbasis konservasi. Meskipun demikian, terdapat ketimpangan antara perencanaan strategi dengan implementasi di lapangan yang berdampak pada efektivitas program serta daya tarik destinasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk mengevaluasi strategi dan mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan pariwisata berbasis konservasi telah tercapai, dengan temuan utama berupa kebutuhan integrasi yang lebih kuat antar dimensi strategi serta pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perilaku wisatawan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi keberlanjutan model co-management antara TNGGP dan masyarakat lokal dalam jangka panjang, serta pengukuran dampak konkret strategi digitalisasi terhadap peningkatan kualitas pengalaman wisata. Selain itu, kajian komparatif antar taman nasional juga dapat memperluas pemahaman tentang efektivitas strategi konservasi-pariwisata lintas wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Administrator Website Pemerintah Cimahi Kota. (2019). *Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik*. [https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1174-pemberantasan-pungli-di-instansi-pemerintah-dan-pelayanan-publik#:~:text=Pungli adalah salah satu tindakan,ordinary crime\) yang harus diberantas](https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1174-pemberantasan-pungli-di-instansi-pemerintah-dan-pelayanan-publik#:~:text=Pungli%20adalah%20salah%20satu%20tindakan,ordinary%20crime%29%20yang%20harus%20diberantas.).



- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Sanabil.
- Eagles, J., P. F., Haynes, D., C., McCool, & F., S. (2002). Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management. In A. Phillips (Ed.), *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK, the United Nations Environment Programme and the World Tourism Organization. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2002.PAG.8.en>
- Gössling, S., & Hall, C. M. (2005). Tourism and Global Environmental Change Ecological, Economic, Social and Political Interrelationships. In *Routledge*. Routledge.
- Husna, F. K. (2022). Analisis Dampak Sektor Pariwisata bagi Perekonomian Warga Sekitar Kawasan Wisata Siblarak Polanharjo Kabupaten Klaten. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(2), 104–117. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.577>
- Jawia Reubun, Muh.Reski Salemuiddin, Muh.Indrabudiman, Sriwahyuni Sriwahyuni, & Akhiruddin Akhiruddin. (2024). STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (Studi Pulau Bair Kota Tual Provinsi Maluku Tenggara). *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 95–105. <https://doi.org/10.62017/arima.v1i4.1074>
- Mudiono, M., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas dan Kinerja Penyelenggara Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. *Jl@P*, 12(2). <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.8966>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- S, G. N., Faridah, H., Masrifah, & Pratama, D. E. (2024). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Masyarakat Yang Mengajak Orang Lain Untuk Golput Dalam Pemilu. *KRTHA BHAYANGKARA*, 18(2), 328–342. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.755>
- Simangungsong, R., & Ziliwu, E. N. (2021). STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI MALAGA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 65–80. <https://doi.org/10.51622/jispol.v1i1.329>